



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI KAMIS, 7 FEBRUARI 2013



DAFTAR ISI

Ekonomi	1-2
Infrastruktur Bandara	3
Pelabuhan	4
Infrastruktur Gas	5
Penurunan Produksi Batubara	6
Infrastruktur Jalan Papua	7



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
PTPN III Menanam Rp. 3 Triliun di Kawasan Industri Sei Mangkei	<div>- PTPN III terus mengembangkan kawasan industri hilir Sei Mangkei Sumatra Utara.</div> <div>- Selain mengembangkan jaringan infrastruktur seperti jalan di dalam kawasan dan sistem pengolahan air bersih (Water Treatment plant) PTPN III membangun pembangkit listrik tenaga biomasa (PLTBS)</div>			Rp. 3 triliun	PTPN III	

■ AGRIBISNIS

PTPN III Menanam Rp 3 Triliun di Kawasan Industri Sei Mangkei

JAKARTA. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III terus mengembangkan kawasan industri hilir Sei Mangkei Sumatera Utara. Perusahaan pelat merah ini telah membenamkan investasi senilai Rp 3 triliun di wilayah tersebut.

Pengelola kawasan Sei Mangkei ini memakai dana tersebut untuk membangun infrastruktur dan pabrik pengolahan kelapa sawit. "Kami sudah membangun kawasan Sei Mangkei sejak 2011 lalu. Sekarang kami mempersiapkan jalur kereta api menuju pelabuhan," kata Komisaris Utama PTPN III, Achmad Manggabarani, kepada KONTAN di Jakarta, Rabu (6/2).

Selain mengembangkan jaringan infrastruktur seperti jalan di dalam kawasan dan sistem pengolahan air bersih (*water treatment plant*), PTPN III membangun pembangkit listrik tenaga biomasa (PLTBS).

Sedangkan untuk memba-

ngun jalur kereta, PTPN III menggandeng PT Kereta Api Indonesia. Panjang jalur kereta api itu mencapai 2.950 kilometer dengan perkiraan nilai investasi Rp 54 miliar.

Di 2012, PTPN III membangun pabrik pengolahan kelapa sawit berkapasitas 75 ton tandan buah segar (TBS) per jam dan pabrik *palm kernel oil* (PKO) berkapasitas 400 ton per jam. "Kami juga membangun tangki penimbunan kelapa sawit," kata Achmad.

Dia mengakui, pengembangan kawasan hilir Sei Mangkei sedikit terlambat akibat terkendala sejumlah faktor. Salah satunya karena penyelesaian penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Masalah tersebut baru selesai dua bulan lalu, setelah rencana tata ruang wilayah dirampungkan. "Investor mulai masuk dan yang pertama kali adalah Unilever. Mereka sudah dalam tahap pembe-

basan lahan," ungkap Achmad.

Di Sei Mangkei, PT Unilever Oleochemical Indonesia siap mengembangkan industri hilir di atas lahan seluas 27,39 hektare. Nilai investasinya ditaksir Rp 2,45 triliun.

Menurut Megananda Daryono, Direktur Utama PTPN III, beberapa investor lain siap mengikuti jejak Unilever. Salah satunya PT Cipta Buana Utama Mandiri yang berniat membangun pabrik pupuk senilai Rp 537 miliar di lahan seluas 20 ha.

Di sana ada juga PT JVL Nusantara Pertama yang akan berinvestasi di lahan 20,42 ha, PT Nergy Uni Resources Pte Ltd yang membutuhkan lahan 28,15 ha. Kemudian, konsorsium PTPN III dan PTPN IV berencana menggunakan lahan 25 ha, sementara PT Sinerji Oleo Nusantara ingin investasi Rp 3,74 triliun.

Fitri Nur Arfenie



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☒ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Minyak Mentah Terkoreksi Sementara	<div>- Salah satu sentiment negative dating dari rilis indeks Purchasing Managers Indeks (PMI) sektor jasa di Italia yang berada dibawah ekspektasi yaitu level 43,9 pada januari 2013</div> <div>- Nizar Hilmy, Analis SoeGee Futures memprediksi, dalam sepekan harga minyak akan naik terbatas di kisaran US\$94,10-US\$100,40 per barel</div>					

Minyak Mentah Terkoreksi Sementara

Setelah konsolidasi, harga minyak berpeluang kembali menguat

Agung Jatmiko

JAKARTA. Harga minyak mentah terkoreksi. Cadangan minyak yang meningkat di Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu penyebabnya.

Harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret 2013 di Bursa Nymex, Rabu (6/2) pukul 17.47 WIB, turun 0,65% menjadi US\$ 96,01 per barel dibandingkan harga sehari sebelumnya. Dalam seminggu, harga minyak telah turun 1,60%.

Pada akhir pekan lalu, harga minyak relatif menguat, terke- rek sentimen data ekonomi di Amerika Serikat (AS), Eropa dan China yang cukup positif. Harga minyak waktu itu sempat menguat ke level US\$ 97,77 per barel, Jumat (1/2).

Namun, aksi *profit taking* membuat pergerakan harga minyak terkoreksi di awal pe- kan ini. Selain itu, data Ameri- can Petroleum Institute (API)

yang menyebut, cadangan mi- nyak mingguan di AS mening- kat sebesar 3,63 juta barel, menambah tekanan pada pe- rgerakan harga minyak di pa- sar *spot*.

Masih akan naik

Nizar Hilmy, analis SoeGee Futures mengatakan, perge- rakan harga minyak dari awal pekan ini masih cenderung tertahan. Salah satu sentimen negatif datang dari rilis indeks *Purchasing Managers Index* (PMI) sektor jasa di Italia yang berada di bawah ekspek- tasi yaitu di level 43,9 pada Januari 2013.

Namun penurunan harga minyak ini hanya sementara. "Sejumlah rilis data dan in- deks ekonomi lainnya di akhir pekan lalu tidak buruk, seti- daknya ini mampu meredam sentimen negatif di pekan ini," kata Nizar.

Ariana Nur Akbar, analis senior Monex Investindo Fu- tures menambahkan, optimis-

me ekonomi global masih ter- lihat dalam pergerakan harga minyak. Menurut dia, koreksi yang terjadi saat ini hanyalah fase konsolidasi dan masih ada potensi kenaikan.

Walaupun ada gejolak poli- tik di Italia dan Spanyol, na- mun pasar cenderung masih optimistis terhadap kondisi umum ekonomi di Eropa. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan politik di Jerman yang masih stabil, sehingga

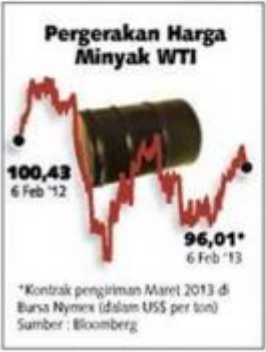
mampu menjaga kepercayaan pasar terhadap prospek pe- mulihan ekonomi Eropa.

Secara teknikal, Nizar meli- hat, tren harga minyak masih akan menguat. *Moving avera- ge* (MA) menunjukkan harga berada di atas MA 50 dan MA 100, mengindikasikan masih adanya ruang kenaikan.

Moving average convergen- ce divergence (MACD) masih berada di area positif, di level 1,03 dengan pergerakan yang cenderung *flat*. Indikator *rela- tive strength index* (RSI) me- nunjukkan adanya kenaikan, dari 60 menjadi 63.

Sementara, indikator *sto- chastic* mengalami penurunan dari titik *overbought* 70 ke le- vel 60, mengindikasikan ada- nya sinyal penurunan.

Nizar memprediksi, dalam sepekan harga minyak akan naik terbatas di kisaran US\$ 94,00 – US\$ 98,00 per barel. Proyeksi Ariana, harga mi- nyak dalam sepekan akan menguat di rentang US\$ 94,10 – US\$ 100,40 per barel.





Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
25 Bandara di Indonesia Mendesak Dikembangkan	<div>- Pembangunan bandara baru maupun pengembangan kapasitas Bandar udara di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak mengingat pertumbuhan penumpang cukup tinggi</div> <div>- Dengan pertumbuhan penumpang yang sangat tinggi, berbagai bandara di Indonesia menghadapi tekanan permintaan yang sangat besar</div>					

INFRASTRUKTUR

25 Bandara di Indonesia Mendesak Dikembangkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengembangkan 14 bandar udara komersial dan pengoperasian 11 bandar udara baru dalam rentang waktu 2013-2015. Pembangunan bandara baru maupun pengembangan kapasitas bandar udara di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak mengingat pertumbuhan penumpang cukup tinggi.

Hal itu dikemukakan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono se usai rapat koordinasi pengembangan bandar udara yang dipimpin Wakil Presiden Boediono, Rabu (6/2), di Kantor Wapres, Jakarta.

Dalam periode tahun 2006-2012 tercatat pertumbuhan rata-rata penumpang internasional di Indonesia mencapai 26,44 persen. Sedangkan pertumbuhan penumpang domestik untuk periode yang sama 11,35 persen.

Menurut Bambang, dengan pertumbuhan penumpang yang sangat tinggi itu, berbagai bandara di Indonesia menghadapi tekanan permintaan yang sangat besar. Banyak bandara harus menangani penumpang jauh di atas

kapasitasnya. "Bahkan sudah ada yang harus melayani penumpang hingga 800 persen di atas kapasitas, seperti di Polonia, Medan," katanya.

Dalam rapat itu terungkap sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengembangan beberapa bandara, antara lain masalah pembebasan lahan dan persiapan sarana penunjang seperti akses jalan.

Selain itu, Kemenhub juga masih mencari cara mengatasi kekurangan anggaran sebesar Rp 145 miliar di tahun anggaran 2013 untuk menyelesaikan pembangunan 11 bandara baru secara tuntas. Wapres meminta agar masalah ini segera diatasi. "Jangan sampai ada pengunduran jadwal lagi," kata Wapres.

Pemerintah tahun ini berencana mengalihkan tempat pemberangkatan jemaah haji, dari yang sebelumnya dilakukan di Terminal III Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ke Bandara Internasional Halim Perdanakusumah. Langkah ini dilakukan seiring dengan dimulainya pengembangan Terminal III Bandara Soekarno-Hatta. (why)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☒ Feb

☐ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☒ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Swasta Akan Digandeng Ikut Mendanai Pelabuhan	<div>- Biaya logistic di Indonesia diakui besar. Untuk itu, pemerintah membenahi sarana infrastruktur di pelabuhan, sehingga arus transportasi bisa cepat dan murah tanpa harus menunggu lebih lama</div> <div>- Kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek pelabuhan hanya 42,6%. Sedangkan sisa investasi diharapkan berasal dari sektor swasta maupun campuran melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)</div>			Rp. 117 Triliun		

Swasta Akan Digandeng Ikut Mendanai Pelabuhan

Pemerintah hanya bisa mendanai 42,6% total investasi pelabuhan yang senilai Rp 117 triliun

Ragil Nugroho

JAKARTA. Kementerian Perhubungan membutuhkan dana sedikitnya Rp 117 triliun untuk mengembangkan 29 pelabuhan di Indonesia selama 2011-2015. Proyek tersebut bertujuan menekan biaya logistik nasional.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan pembedaan pelabuhan dapat mengakomodasi muatan kapal dengan kapasitas lebih besar yaitu mencapai 5.000 kontainer. Pengembangan 29 pelabuhan telah tertuang dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dari rencana itu, pemerintah memprioritaskan mengembangkan empat pelabuhan di Indonesia. Keempat pelabuhan itu adalah Pelabuhan

han Tanjung Priok (Jakarta), Belawan (Medan), Tanjung Perak (Surabaya) dan Pelabuhan Makassar.

Setelah itu menyusul delapan pelabuhan yakni Tanjung Wangi (Banyuwangi), Tanjung Emas (Semarang), Trisakti (Banjarmasin), Lember (Lombok Barat), Pangkal Balam (Bangka-Belitung), Benoa (Bali), Kota Baru (Kota Baru) dan Cilamaya (Karawang).

Adapun 17 proyek pelabuhan lagi masih dalam pembahasan. "Yang jelas pengembangan akan berlangsung merata ke seluruh wilayah Indonesia," ujar Bambang.

Biaya logistik di Indonesia diakui besar. Untuk itu, pemerintah membenahi sarana infrastruktur di pelabuhan, sehingga arus transportasi bisa cepat dan murah tanpa menunggu lebih lama.

Tingginya biaya logistik tidak hanya di bidang transpor-

tasi, "Tapi juga sarana penunjangnya seperti dalam ekspor dan impor barang ada bea cukai dan proses karantina. Jadi harus didukung sejumlah pihak," tutur Bambang.

Dari kebutuhan dana senilai Rp 117 triliun, menurut dia, kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek pelabuhan hanya 42,6%. Dana ini bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama periode 2011-2015. Sedangkan sisa investasi diharapkan berasal dari sektor swasta maupun campuran melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) mendukung proyek pemerintah dan siap mendukung program ini. "Sebelumnya kami baru mengembangkan pelabuhan yang sesuai dengan wilayah kerja kami, namun kami siap membantu, apalagi tahun ini mulai

menggarap Pelabuhan Sorong di Papua," ujar Direktur Utama Pelindo II, R J Lino.

Berdasarkan data Global Competitiveness Report 2012-2013, dari 144 negara, daya saing pelabuhan di Indonesia berada di urutan ke-104.

Bambang menambahkan, jika ingin menekan ekonomi biaya tinggi, revitalisasi pelabuhan harus menjadi prioritas. Pelabuhan di Indonesia umumnya memiliki kedalaman kolam dangkal, penjang dermaga pun relatif pendek dan fasilitas pelabuhan, termasuk alat bongkar muat sudah ketinggalan jaman. "Ke depan kita akan menerapkan sistem elektronik kepelabuhanan dengan kerjasama Pelindo I, II, III dan IV. Akhir tahun ini diharapkan bisa tuntas dan sistem ini bisa menghapus pungutan liar di pelabuhan," harap Bambang.

Operator juga bisa menem-

puh upaya lain, yaitu meningkatkan SDM kepelabuhan, sehingga dapat mempercepat pengangkutan kontainer lebih banyak dalam waktu singkat. "Sarana kapal juga penting, dengan pengadaan kapal besar yang lebih modern menjadikan angkutan barang lebih efisien," ujarnya.

Proyek Pelabuhan di Indonesia

Nama Pelabuhan	Mulai Digarap	Perkiraan Selesai
Tanjung Priok	2011	2014
Belawan	2011	2013
Tanjung Perak	2012	2013
Makassar	2012	2014
Tanjung wangi	2012	2014
Tanjung Emas	2012	2014
Trisakti	2013	2015
Lember	2013	2015
Pangkal Balam	2012	2015
Benoa	2013	2015
Kota Baru	2013	2015
Cilamaya	2014	2019

Sumber: Kementerian Perhubungan



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:



POSITIF (+)



NETRAL



NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Percepat Pembangunan Infrastruktur Gas	<div>- Pemerintah telah menetapkan alokasi gas untuk beberapa terminal penerima dan regasifikasi gas alam cair.</div> <div>- Dengan kepastian pasokan gas itu, pembangunan infrastruktur gas diharapkan bisa dipercepat</div> <div>- Selama ini pemenuhan kebutuhan gas di dalam negeri terkendala infrastruktur. Untuk itu, saat ini pipa trans Jawa dan trans Sumatera tengah dibangun untuk mendistribusikan gas dari sumber gas kepada para konsumen atau pengguna gas</div>					

KETAHANAN ENERGI

Percepat Pembangunan Infrastruktur Gas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah menetapkan alokasi gas untuk beberapa terminal penerima dan regasifikasi gas alam cair. Dengan kepastian pasokan gas itu, pembangunan infrastruktur gas diharapkan bisa dipercepat.

"Kami berkomitmen menyediakan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Rabu (6/2) petang, di Jakarta.

Untuk itu, Jero Wacik telah menandatangani surat alokasi gas yang ditujukan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dalam surat itu, jatah alokasi gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*) akan dipasok ke beberapa terminal penerima gas mulai tahun 2013 sampai dengan 2025.

Alokasi gas untuk memenuhi kebutuhan gas di beberapa fasilitas penerima dan regasifikasi gas itu berasal dari Kilang Tangguh, Papua Barat, sebanyak 20 kargo per tahun mulai tahun lalu, sedangkan 40 persen dari total produksi Train (Unit) 3 Tangguh yang akan mulai beroperasi tahun 2018.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan 16 kargo LNG dari Blok Mahakam, Kalimantan Timur (Kaltim), untuk kebutuhan di dalam negeri.

Pemerintah juga menetapkan alokasi LNG dari Blok Jangkrik dan North East Jangkrik di Kaltim yakni 14 kargo pada 2016, 18 kargo pada tahun 2017-2022, sebanyak 7 kargo pada tahun 2023, dan 4 kargo pada tahun 2024-2025. Dari Chevron IDD di Selat Makassar, Sulawesi Selatan, alokasi gas untuk domestik pada 2017-2019 sebanyak 50 kargo, ga-



Jero Wacik

da 2020-2021 sebanyak 30 kargo, dan tahun 2022 alokasinya 16 kargo, sedangkan tahun 2023 sebanyak 10 kargo.

"Dalam rencana pengalokasian pasokan gas itu, tentu dalam perjalanannya ada perubahan sedikit. Di samping disalurkan melalui pipa yang ada atau sedang dibangun, gas bumi akan disalurkan melalui sejumlah terminal terapung penerima dan regasifikasi gas (*floating storage and regasification unit/FSRU*) yang sedang dibangun," kata Jero.

Diserap industri

Sejauh ini pemanfaatan gas untuk dalam negeri paling banyak diserap untuk industri, yaitu 42 persen dari total volume gas domestik, untuk PT Perusahaan Gas Negara 20 persen, dan untuk produksi minyak 14 persen. Selain itu, 21 persen dari total alokasi gas di dalam negeri diserap sektor kelistrikan untuk menekan biaya produksi listrik yang akan berdampak pada penurunan subsidi listrik.

Selama ini pemenuhan kebutuhan gas di dalam negeri terkendala infrastruktur. Untuk itu, saat ini pipa trans Jawa dan trans Sumatera tengah dibangun untuk mendistribusikan gas dari sumber gas kepada para konsumen atau pengguna gas. Selain itu, FSRU Jawa Barat telah beroperasi dan memasok kebutuhan gas untuk pembangkit listrik milik PT PLN, sedangkan beberapa FSRU lain akan dibangun di beberapa lokasi, yaitu FSRU Jawa Tengah, FSRU Lampung, FSRU Banten, dan terminal regasifikasi Kilang Arun, Lhokseumawe, Aceh.

Dari sejumlah sumber gas itu, menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM A Edy Hermantoro, FSRU Jawa Barat akan mendapat pasokan gas 27 kargo pada 2013-2025. Terminal regasifikasi Arun akan mendapat 8 kargo pada 2015, dan setelah melalui pengujian akan mendapat jatah LNG 16 kargo pada 2016-2025.

Proyek FSRU Jawa Tengah akan mendapat alokasi LNG 8 kargo pada 2015. Tiga tahun berikutnya, terminal terapung itu akan mendapat jatah LNG 16 kargo pada 2016-2018, dan 22 kargo pada 2019-2022, 16 kargo pada 2023, dan turun menjadi 8 kargo pada 2024-2025 seiring penurunan produksi gas secara alami dari sumber gas.

FSRU Banten mendapat alokasi LNG 6 kargo pada 2015, 16 kargo pada 2016-2022, dan 8 kargo pada 2023. "Surat Menteri ESDM mengenai penetapan alokasi gas itu disampaikan kepada SKK Migas. Dengan adanya alokasi gas ini, porsi gas untuk memenuhi kebutuhan domestik akan makin besar," kata Edy. (EYV)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

☐ Kompas ☐ Media Indonesia ☐ Koran Tempo ☐ Bisnis Indonesia
☐ Republika ☐ Sinar Harapan ☐ Suara Pembaruan ☐ Pikiran Rakyat
☐ Rakyat Merdeka ☐ Seputar Indonesia ☐ Investor Daily ☒ Kontan ☐ Lain-lain,
☐ Suara Karya ☐ Neraca ☐ Jurnal Nasional ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pusat Menolak Produksi Batubara Diturunkan	<ul style="list-style-type: none">Selain isu lingkungan, terdapat tiga aspek lain yang seharusnya diperhatikan untuk mengendalikan produksi batubara ini, yakni potensi penerimaan Negara, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di wilayah setempatJika produksi batubara menurun, tentu akan berdampak pada anjaknya nilai ekspor komoditas tersebut, alhasil penerimaan Negara juga bakal turut berkurang					

Pusat Menolak Produksi Batubara Diturunkan

Permohonan untuk menurunkan produksi batubara harus disetujui oleh DPR

Muhammad Yazid

JAKARTA. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengurangi produksi batubara pada 2013 ini. Pengurangan produksi batubara tersebut bertujuan untuk meminimalkan terjadinya dampak lingkungan akibat maraknya aktivitas pertambangan.

Untuk itu, pada 25 Januari 2013 lalu, Gubernur Kaltim Awang Faroek menerbitkan surat edaran ke bupati dan walikota se Kaltim. Surat bernomor 180/1375-HK/2013 itu berisi tentang moratorium pemberian izin baru dalam usaha pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Moratorium ini berlaku setahun.

Selain itu, Awang juga menyurati Kementerian ESDM untuk meminta persetujuan pengendalian produksi batubara dari seluruh perusahaan di daerahnya. Dari total produksi mencapai 220 juta per tahun, Gubernur meminta diturunkan jadi 150 juta ton.

Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM),

mengatakan, pihaknya sudah menerima usulan dari Gubernur Awang Faroek untuk mengendalikan produksi batubara di wilayahnya.

"Mereka sudah mengajukan ke kita, namun tetap saja susah dipenuhi. Karena ini menyangkut kebijakan nasional, maka harus minta persetujuan dahulu DPR RI," ungkap Thamrin disela-sela mengikuti rapat Panitia Komisi VII DPR RI, Rabu (6/2).

Kalau produksi diturunkan sebesar 70 juta ton, target produksi batubara nasional sebesar 366,04 juta ton pasti gagal tercapai. Apalagi saat ini, 70% produksi batubara nasional berasal dari Kaltim.

Dia mengatakan, memang masing-masing provinsi penghasil batubara, seperti Kaltim, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, serta Sumatera Selatan diperkenankan untuk mengajukan usulan pengendalian produksi batubara.

Meski demikian, pemerintah pusat sejauh ini tetap memegang keputusan untuk menetapkan rencana produksi batubara pada setiap tahunnya. Apalagi, produsen pertambangan batubara memiliki kewajiban untuk memenuhi

kebutuhan pasar domestik atau *domestic market obligation* (DMO). "Para perusahaan batubara juga punya kewajiban DMO. Misalnya untuk kebutuhan PLN, maka perusahaan itu wajib untuk menyuplainya," imbuhnya.

Wajib jual di pasar domestik tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembangkit, pabrik pupuk, ataupun pabrik *smelter*. Sehingga, lanjut Thamrin, provinsi tidak akan bisa mengeluarkan kebijakan tersebut tanpa persetujuan pusat.

Penerimaan turun

Thamrin memberi sinyal, pihaknya tidak akan memberi restu ke Pemprov Kalimantan Timur terkait usulan pengurangan produksi batubara ini. Namun dia menolak menyebutkan jumlah produksi usulan provinsi.

"Secara regional itu, kan, bisa saja pengendalian produksi. Tapi kebutuhan batubara ini menyangkut seluruhnya yaitu Indonesia," ujar dia.

Ia menambahkan, selain isu lingkungan, terdapat tiga aspek lain yang seharusnya diperhatikan untuk mengendali-

kan produksi batubara ini. Yakni, potensi penerimaan negara, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat.

Thamrin menjelaskan, jika produksi batubara menurun, tentu akan berdampak pada anjaknya nilai ekspor komoditas tersebut. Alhasil, penerimaan negara juga bakal turut berkurang.

Seperti diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2934 Tahun 2012 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Pejualan Batubara untuk Kepentingan Domestik Tahun 2013 disebutkan, kewajiban DMO mencapai sebanyak 74,3 juta ton, dari total produksi nasional 366,04 juta ton. Di mana, kewajiban DMO nantinya harus dipenuhi 74 produsen batubara.

kan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2934 Tahun 2012 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Pejualan Batubara untuk Kepentingan Domestik Tahun 2013 disebutkan, kewajiban DMO mencapai sebanyak 74,3 juta ton, dari total produksi nasional 366,04 juta ton. Di mana, kewajiban DMO nantinya harus dipenuhi 74 produsen batubara.

Pengusaha Kian Tertekan

NASIB pengusaha batubara tampaknya kian tertekan. Tak cuma karena harga yang belum pulih, peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menekan bisnis pengusaha batubara.

Baru-baru ini misalnya, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengeluarkan Perda Nomor 5/2011 Pasal 52 tentang kegiatan pengangkutan batubara lintas kabupaten/kota yang harus melalui jalan khusus yang ditetapkan dalam keputusan itu. Kewajiban ini diberlakukan dua tahun sejak peraturan dirilis Pemprov Sumatera Selatan, artinya mulai diterapkan pada tahun 2013 ini.

Alhasil Anggawira, Wakil Sekretaris Jenderal Aspebindo sejak 1 Januari 2013 ada 1 juta ton batubara yang tidak bisa dikirim keluar Sumsel. Selain itu, kata Anggawira, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hassan juga akan menaikkan tarif sewa hutan untuk pertambangan. Dari yang semula Rp 3 juta per hektare (ha) menjadi Rp 4 juta per ha. "Kalau begini banyak perusahaan yang gulung tikar," katanya.



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Buka Keterisolasian Papua	- Manfaat yang diperoleh jika semua wilayah di Papua sudah terhubung paling utama tentu ongkos transportasi dan harga barang di pedalaman menjadi rendah. Infrastruktur jalan juga akan mendorong percepatan pembangunan seperti pendidikan dan kesehatan					

INFRASTRUKTUR JALAN

Buka Keterisolasian Papua

"Kami ingin maju seperti saudara-saudara yang lain. Selama ini, kami selalu berdoa kepada Tuhan agar pemerintah terbuka hatinya untuk membuat jalan bagi kami," ujar Obed Sibetae, Kepala Desa Sikari, Distrik Ruffaer, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, saat bertemu tim Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Rabu (23/1), di Burmeso, ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya.

Harapan Obed seperti keinginan warga Papua lainnya yang tinggal di pedalaman Papua. Sebab, selama ini akses jalan darat di Papua yang terhubung dengan wilayah lain ibarat mimpi indah. Dari Desa Sikari, misalnya, butuh waktu 4-5 hari berjalan kaki, menembus hutan belantara, menuju Burmeso. Padahal, jarak Sikari ke Burmeso sekitar 100 kilometer.

Karena itu, untuk menghemat waktu, warga Sikari jika bepergian ke Burmeso harus lewat Sungai Mamberamo menggunakan perahu bermesin tunggal berkekuatan 15 PK. Dengan memakai perahu batang—istilah warga—waktu tempuh rata-rata 6 jam. Ongkos per orang bisa mencapai Rp 1 juta. Meski lebih cepat ketimbang jalan kaki, biayanya memang lebih tinggi.

Contoh lainnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dari Jayapura ke Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang, tak ada cara selain menggunakan pesawat terbang yang menempuh satu jam penerbangan. Oksibil, yang berada di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut, memang belum tersambung jalan dengan kabupaten lainnya. Inilah yang membuat kabupaten berpenduduk 113.000 jiwa itu seolah semakin terisolasi.

Dengan demikian, pasokan barang kebutuhan sehari-hari di Oksibil sangat bergantung pada angkutan udara dari Jayapura. Dampaknya, harga-harga barang terbilang sangat tinggi dibandingkan daerah lain di Papua, apalagi di Jawa. Dalam kondisi normal, bensin eceran di Oksibil dijual Rp 70.000 per liter. Namun, jika pasokan langka atau tinggi, seperti Natal dan tahun

baru, harga bensin melonjak hingga Rp 200.000 per liter.

"Selain dipakai untuk kendaraan bermotor, bensin juga buat menyalakan mesin genset. Untuk penerangan, Oksibil memang masih bergantung pada genset atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang jumlahnya sangat terbatas. Kira-kira tak sampai 10 persen warga Pegunungan Bintang yang menikmati listrik dari genset atau PLTS," kata Asisten I Tata Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang Budi Wardaya.



Untuk penerangan, Oksibil memang masih bergantung pada genset atau pembangkit listrik tenaga surya.

1.500 kilometer

Untuk membuka keterisolasian di Papua dan Papua Barat, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) menginisiasi pembukaan jalan baru sepanjang 1.500 kilometer. Jalan itu melintasi pegunungan dan menembus hutan belantara, mulai dari Wasior di Papua Barat hingga di Yahukimo, Papua.

Dalam pengerjaan jalan, UP4B akan menggandeng Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat. Alasannya, selain medan berat, juga dibutuhkan fisik prima bagi mereka yang terlibat dalam pembukaan jalan darat lintas Papua itu. Biayanya juga relatif murah. Proyek pembukaan jalan ini senilai Rp 800 miliar-Rp 1,5 triliun, berasal dari APBN. Dijadwalkan pembukaan jalan dimulai Maret 2013. Penyelesaiannya pada pertengahan 2014.

Meski jalan yang dibuka selebar 12 meter, lebar badan jalan hanya 6 meter. "Proyek ini hanya sampai pembukaan jalan. Pengaspalannya tergantung pemerintah daerah yang wilayah-

nya dilalui jalan," ujar Staf Ahli Kepala UP4B Dodi Imam Hidayat.

Menurut dia, manfaat yang diperoleh jika semua wilayah di Papua sudah terhubung paling utama tentu ongkos transportasi dan harga barang di pedalaman menjadi rendah. Infrastruktur jalan juga akan mendorong percepatan pembangunan seperti pendidikan dan kesehatan.

Sejak pertengahan Januari 2013, tim UP4B mulai menentukan titik-titik yang akan dilalui pembukaan jalan tersebut. Survei dilakukan lewat udara dengan helikopter dan pesawat udara. Selain pengamatan dari udara, tim survei juga turun ke darat memastikan lokasi yang menjadi pembukaan jalan.

Namun, pemerhati masalah kehutanan di Papua, Lindon Pangkali, mengingatkan agar proyek jalan lintas tersebut tidak berdampak bagi lingkungan di sekitarnya. Ia berharap, analisis mengenai dampak lingkungan pembukaan jalan betul-betul diperhatikan. Jangan sampai pembukaan jalan yang menembus hutan justru menimbulkan banjir atau tanah longsor.

"Hasil tebangan pohon pada pembukaan jalan harus diawasi secara ketat. Sebab, nilai ekonomi dari kayu tebangan yang sangat tinggi akan dibawa ke mana? Apakah akan diserahkan kepada pemerintah setempat atau kepada Kementerian Kehutanan? Ini tidak boleh disalahgunakan," tandasnya.

Sementara Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua Benny Giyai berharap agar proyek tersebut melibatkan orang asli Papua. Setelah pembukaan jalan, warga juga perlu dilatih sebagai wirasaha agar bisa menikmati keuntungan ekonomi dari pembukaan jalan tersebut.

"Kami tak peduli siapa yang bangun jalan itu. Bagi kami, yang penting bangun segera jalan itu. Puluhan tahun bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi kami tidak menikmati jalan," keluh Natanjer Uropdana (54), warga di Oksibil.

Ya, mengapa? (AFO/JOS)